

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia disertai pengelolaan keuangan dengan administrasi yang baik untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pada bidang ekonomi. Dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, pemerintah harus saling bekerja sama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sector ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Pertumbuhan perekonomian nasional yang menguat menjadi salah satu peluang dalam upaya untuk menarik investor. Ekonomi Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 5,01% (yoy) pada kuartal pertama tahun 2022 dan tercapai seiring dengan laju inflasi yang terkendali. Potensi ini yang harus dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur sendiri urusan pemerintahan masing-masing menurut asas otonomi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan daya saing di negara sendiri maupun negara lain. Dan dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban dalam membangun potensi di daerahnya. Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari adanya salah satu peran sektor UMKM. Kehadiran sektor UMKM berdampak pada berkurangnya pengangguran dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap di dunia kerja. Dengan adanya UMKM membuat pertumbuhan dan perkembangan dalam kesempatan mendapat kerja dan pendapatan naik. Adanya penyerapan tenaga kerja dengan jumlah banyak membantu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang menjadikan UMKM mempunyai peran yang vital. Peran yang dimiliki UMKM pada pembangunan perekonomian sangat penting, dikarenakan berperan pada kemajuan ekonomi serta dapat menyerap tenaga kerja, peran yang dimiliki oleh UMKM yaitu pemerataan dalam pembangunan.

Pada saat terjadi krisis ekonomi besar-besaran di Indonesia pada tahun 1998 lalu, usaha besar yang stagnasi atau sampai terhenti kegiatannya jumlahnya membludak, kenyataannya usaha kecil cukup efektif dan dapat bertahan dari krisis ekonomi

tersebut. Melihat kejadian Indonesia pada masa krisis, tidak berlebihan untuk fokus pada pengembangan UMKM swasta, dan sektor usaha ini sering diabaikan karena outputnya kecil dan tidak mampu bersaing dengan bisnis lain. Karakteristik umum UMKM adalah usaha yang mandiri, swasembada dana, wilayah pemasaran yang terlokalisir, aset perusahaan kecil, dan jumlah pegawai yang terbatas. Prinsip-prinsip pelaksanaan UMKM adalah kesatuan, ekonomi kerakyatan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi peradilan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam membangun potensi daerah diperlukan peran pemerintah daerah. Salah satu peran pemerintah daerah adalah menggali potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena UMKM memiliki kedudukan dalam perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja, menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan memiliki potensi sebagai penghasil devisa dari kegiatan ekspor. Karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam proses pertumbuhan UMKM.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar baik dibidang sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara telah memiliki kawasan budi daya yang berpotensi dan pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Tabel 1.1

Kawasan Andalan Nasional Sumatera Utara

Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Perkotaan Metropolitan Medan Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan
Pematang Siantar dan Sekitarnya	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
Rantau Prapat-Kisaran	Perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, industri
Tapanuli dan Sekitarnya	Perkebunan, pertambangan, perikanan laut, pertanian, industri, pariwisata
Nias dan Sekitarnya	Pariwisata, perkebunan, perikanan
Laut Lhokseumawe-Medan dan Sekitarnya	Perikanan, pertambangan
Laut Selat Malaka dan Sekitarnya	Perikanan, pertambangan
Laut Nias dan Sekitarnya	Perikanan, pertambangan

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan, pemerintah Sumatera Utara melaksanakan tugas dengan menyusun dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah Sumatera Utara juga membentuk Dinas Daerah yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan di bentuk dan adanya pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM di setiap Kabupaten/Kota, dapat mengembangkan UMKM dengan meningkatkan pelaku-pelaku usaha mikro kecil menengah dan meningkatkan daya tarik investasi dalam mengembangkan sektor -

sektor UMKM di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dampak dari pertumbuhan yang signifikan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semakin meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru dan tergalinya potensi-potensi daerah karena pada umumnya UMKM memberdayakan bahan baku lokal.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kota Medan Tahun 2019 – 2021

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit		
		2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	23.768	24.053	25.165
2	Usaha Kecil	26.234	27.108	27.893
3	Usaha Menengah	14.092	14.934	15.674
	Total	64.094	66.095	68.732

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan 2021

Data di atas menunjukkan jumlah unik usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar sebagai usaha binaan dari kantor Dinas UMKM Kota Medan, bahwa setiap tahunnya UMKM memiliki pertumbuhan maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Medan.

Menurut hasil penelitian Sedyastuti (2018) keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama

setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah dalam mengakses informasi dan mengelola modal, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah hubungan dengan prospek bisnis yang kurang jelas dan perencanaan visi misi yang belum stabil. Pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudahan akses pendanaan dan pendampingan serta peningkatan kapasitas teknologi informasi merupakan beberapa strategi peningkatan daya saing UMKM Indonesia, yang tak kalah pentingnya adalah jiwa kewirausahaan yang tak pantang menyerah. Oleh karena itu diperlukan sinergi semua pihak terutama antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan mikro. Berbanding lurus dengan penelitian terdahulu, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dalam perkembangan UMKM Kota Medan, masih terdapat beberapa isu-isu strategis yaitu: rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM, rendahnya pertumbuhan koperasi dan UKM, kurangnya koperasi dan UMKM yang mendapat akses permodalan, rendahnya daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil, terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan koperasi dan UMKM. (Departemen Koperasi dan UMKM, 2018)

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan UMKM tersebut, masih dibutuhkan peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang akan sangat berdampak pada perkembangan UMKM di Kota Medan. Dan tentunya akan sejalan dengan pencapaian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan sebagai Kota yang berdaya saing dengan iklim investasi yang menarik dan kondusif. Dengan demikian,

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan juga dapat membangkitkan citra yang positif dari masyarakat terhadap UMKM di Kota Medan.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ,**“Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan”**. .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. .Bagaimana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan
2. Bagaimana pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan yang telah memperoleh pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan?
3. Bagaimana peranan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

2. Untuk menganalisa pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan yang telah memperoleh pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan
3. Untuk menganalisa peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat bagi banyak pihak terutama

1. Bagi Peneliti,

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti secara lebih mendalam terkait peranan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Hasil Penelitian berguna sebagai referensi dan informasi tambahan dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Menurut Sulfadli (2022:15) pembangunan ekonomi merupakan “proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi ,bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri”.Pembangunan ekonomi adalah “suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup kemakmuran dalam jangka panjang.”

Selanjutnya simon Kuznets dalam Sulfadli (2022:24) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan Negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan dalam UMKM dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Muljarijadi (2011:1) pembangunan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan jumlah dan komposisi output barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh sebuah negara/wilayah serta peningkatan pendapatan masyarakat – perubahan pola komposisi output barang dan jasa sering kali dikenal sebagai perubahan struktural.”

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Rahmawati (2021 : 73) Usaha Mikro, kecil, dan Menengah yaitu :“Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),karena disitulah tumpuhan hidup terbesar rakyat Indonesia.

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi.”

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro, yaitu usaha yang produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria aset \leq Rp.50 juta dan omzet \leq Rp300 juta.
2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Rp50 juta < aset \leq Rp500 juta dan Rp300 juta < omzet \leq Rp2,5 milyar.
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Rp500 juta < aset \leq Rp2,5 milyar dan Rp2,5 milyar < omzet \leq Rp50 milyar.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menentukan, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan
- b. demokrasi ekonomi
- c. kebersamaan
- d. efisiensi berkeadilan
- e. berkelanjutan
- f. berwawasan lingkungan
- g. kemandirian
- h. keseimbangan kemajuan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatakan, “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan

dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Menurut Budiarto, dkk (2015:17) potensi besar sektor UMKM adalah:

1. Tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal semisal gejolak perekonomian dunia, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya,
2. selang waktu produksi (time lag) UMKM relatif singkat,
3. keperluan modal UMKM, khususnya UMK, relatif kecil,
4. sebagian besar usaha UMKM merupakan kegiatan padat karya dan mampu mendayagunakan skill dan semi skill workers.
5. penciptaan lapangan kerja pada tingkat biaya modal yang rendah,
6. kemampuan dalam forward dan backward linkage antara berbagai sektor,
7. memiliki peluang besar di dalamnya bagi pengembangan dan adaptasi berbagai teknologi,
8. mengisi berbagai ceruk pasar yang tidak efisien bagi perusahaan besar, dan
9. sebagai penopang eksistensi perusahaan skala besar,

Menurut Prawirokusumo dalam Budiarto, dkk (2015:5) karakteristik pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut.

1. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.
2. Dalam permodalannya, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, tetapi ia bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
3. Dalam hal pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.

2.3 Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kemasyarakatan. Posisi dalam masyarakat merupakan

unsur statis yang menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Soekanto dalam Nur (2017:4) berpendapat bahwa peranan mencakup tiga hal:

1. Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi oleh tempat dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian dalam peraturan yang membatasi kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dan organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dari struktur sosial.

Sedangkan, Yeni absah (2016:4) menyatakan bahwa “peran UMKM dalam pembangunan perekonomian indonesia Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat.”

2.4 Pemberdayaan

Menurut Zulkarnain.dkk (2022:16) Pemberdayaan merupakan sebuah istilah dan ungkapan semakin populer akhir-akhir ini diberbagai tulisan dan media massa. Pemberdayaan tersebut merupakan suatu jawaban dari keadaan yang selama ini tidak terjawab karena kegagalan atau ungkapan yang dapat menjawab persoalan pembangunan yang selama ini telah dilakukan. Dalam program pembangunan pemerintah lazim disebutkan program pemberdayaan masyarakat agar keterlibatan masyarakat dalam membangun tidak terabaikan.

Menurut Zulkarnain.dkk (2022:16) Pemberdayaan disebut sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah” proses instan “. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu :

1. Penyadaran , tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu.
2. Pengkapasitasan, yang sering disebut “capacity building”, atau dalam bahasa lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu lebih dahulu. Memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok.
3. Pendayaan, yakni proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima,

Menurut Hafiluddin.dkk (2014:71) Pemberdayaan juga biasa diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangun di daerah, termasuk aparatatur, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pranaka dalam Purba (2013:17) menyatakan bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Menurut Hogan dalam Purba (2013:18), proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (empowering is not an end state, but a process that all human experience).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.

Menurut Purba (2013:17) pemberdayaan UMKM titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya UMKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan UMKM yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan UMKM secara umum.

Sebagaimana proses pemberdayaan masyarakat, menurut Purba (2013:29) proses pemberdayaan UMKM juga tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UMKM sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku UMKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau nonpemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UMKM tersebut, pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses dapat terus berlangsung.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan filosofi lima jari/five finger philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.<https://www.hestanto.web.id/pemberdayaan-umkm/>

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Pemberdayaan UMKM digambarkan melalui 5 aspek, sebagai berikut:

1. Permodalan

Menurut Riyanto dalam Primyastanto (2016:55) permodalan usaha secara kajian ilmu ekonomi adalah bahan mentah atau dana dalam bentuk uang kas yang digabungkan dengan faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja berkolaborasi untuk menghasilkan suatu barang baru.

Primyastanto (2016:94) modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja bekerja untuk menghasilkan barang baru.

2. Pemasaran

Menurut Dermanto dan Wardaya (2016:5) pemasaran itu merupakan proses dari seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi lain agar mereka yang menginginkan dan memerlukan produk atau jasa dapat terpenuhi dan mereka yang memiliki produk atau jasa memperoleh keuntungan. Hubungan ini diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu panjang.

Marjorie Clayman- Director of Client Development Clayman Advertising, Inc dalam Dermanto dan Wardaya (2016:3) pemasaran adalah “membangun merek, meyakinkan orang bahwa merek produk/jasa/perusahaan adalah yang terbaik dan melindungi hubungan, membangun dengan pelanggan. Pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.”

Jeff Cutler- Executive Vice President dan General Manager Vitals.com dalam Dermanto dan Wardaya (2016:3) pemasaran adalah “usaha untuk menarik pelanggan, mitra, investor, karyawan dan orang lain langsung berinteraksi dengan membantu pengguna memutuskan apakah mereka akan memakai barang dan jasa baik untuk dimiliki atau diperlukan.”

3. Teknologi

Menurut Latif dan Ahmad dalam Budiarto, et.al (2015: 104) bagi suatu negara, teknologi mempunyai posisi sentral dalam usahanya meraih berbagai target bisnis dan pertumbuhan ekonomi, produktivitas industri, serta dalam perdagangan dan daya saing internasional.

Menurut Djakfar (2012:174) untuk mempercepat kemajuan aktivitas bisnis sudah barang tentu perlu mengadopsi penggunaan teknologi sebagai infrastruktur manajemen yang harus dilakukan. Memanfaatkan jasa telepon, faksimile, e-mail, internet, dan lain sebagainya yang kian hari kian modern dengan sendirinya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin di hindari. Tanpa banyak mengadopsi jasa beragam teknologi tersebut, manajemen sebuah perusahaan tidak akan berjalan cepat dan mampu mengimbangi kemajuan perusahaan lain yang lebih maju untuk menjadi mitra bisnisnya.

Djakfar (2012:174) Teknologi adalah sebuah benda mati yang penggunaannya sangatlah tergantung pada moralitas manusia di balik teknologi itu sendiri. Apakah penggunaan teknologi secanggih apa pun dapat menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat atau justru merugikan, tentu saja ini sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang mengoperasikan.

4. Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno (2017:4) sumber daya diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari diri manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power).

Menurut Ndraha dalam Sutrisno (2017:4) sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: intelligence, creativity dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot dan sebagainya.

5. Perizinan

Menurut Yusriadi (2018:92) pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mencakup :

1. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
2. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
3. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
4. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
5. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;
6. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
7. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

2.4.1 Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan UMKM

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah menginstruksikan: Para Menteri dan Menteri Negara seluruh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Gubernur serta Bupati/Walikota, sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, melaksanakan pemberdayaan usaha menengah yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pembiayaan
 - a. melakukan fasilitas dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya;
 - b. membentuk dan mengembangkan lembaga pinjaman kredit, serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor;
 - c. melakukan fasilitas restrukturisasi utang/kredit usaha menengah yang bermasalah.

2. Pemasaran
 - a. mendorong peningkatan pangsa pasar melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, penetrasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha;
 - b. membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemasaran, pemasyarakatan E-commerce serta peningkatan fungsi rumah dagang (trading house).
3. Teknologi
Teknologimendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu design, produk, proses produksi dan pelayanan sehingga memenuhi standar mutu internasional.
4. Sumber daya manusia
Menggalakkan lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang akan dikembangkan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial, teknik produksi, mutu produk dan pelayanan serta pemasaran.
5. Perizinan
Menyederhanakan sistem dan prosedur perizinan terutama pendirian, pembiayaan dan pengembangan.

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan UMKM

Pasal 5 UU No.20/2008 menentukan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.4.3 Prinsip Pemberdayaan UMKM

Pasal 4 Undang- undang Nomor 20 tahun 2008 menyatakan Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

2.5 Pengembangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 ayat (10) Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM."

Menurut Brown dan Petrello dalam Widaningsih dan Ariyanti (2018:90) pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba.

Menurut Widaningsih dan Ariyanti (2018:90) pengembangan usaha adalah tugas dan proses analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang bersekala besar dan mapan terutama di bidang teknologi industri yang terkait “Pengembangan Usaha” istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain, perusahaan pihak ketiga. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian, teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis terfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategis melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi/divestasi teknologi, produk, dan lain-lain.

Pengembangan UMKM digambarkan melalui 4 aspek:

1. Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Armstrong dalam Yunita Sawitri dkk (2013:3) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketetapan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai lainnya.

2. Diversifikasi Produk

Menurut Ismanthono (2006:65) upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui penganekaragaman produk, baik lewat pengembangan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Namun menurut Primyastanto (2014:158) diversifikasi produk, menciptakan produk-produk baru sesuai segmentasi pasar yang dituju berdasarkan selera dan daya beli konsumen.

3. Produksi

Menurut Khusaini (2013:67) produksi didefinisikan sebagai kegiatan untuk menciptakan guna. Dalam hal ini guna berarti kemampuan, yaitu kemampuan barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan

4. Keuntungan

Menurut Poniman dan Hidayat (2015:12) keuntungan adalah laba atau selisih nilai penjualan terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan atau memproduksi barang atau suatu jasa.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2015:7) keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi pemilik bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk keuntungan yang di harapkan lebih banyak dalam bentuk finansial. Besarnya keuntungan telah ditetapkan sesuai dengan target yang diinginkan sesuai dengan batas waktunya.

2.5.1 Prinsip-Prinsip Pengembangan UMKM

Agar pengembangan UMKM dilaksanakan tidak terlepas dari koridor pengelolaan perguruan tinggi, menurut Budiarto,dkk (2016:96) terdapat sejumlah prinsip yang perlu dijadikan acuan.

1. Kemaslahatan

Kemaslahatan di sini mengandung makna kebaikan dan kemanfaatan bersama. Secara umum, pola pengembangan UMKM harus mendatangkan kemanfaatan yang nyata dan dirasakan oleh seluruh stakeholders yang terlibat. Orientasi manfaat ini akan menjadi lebih intensif dengan mengikuti prinsip umum kerjasama masa kini, yaitu saling menguntungkan dan mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bersama antara berbagi mitra (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan UMKM). Pihak yang mendapatkan porsi manfaat tersebut adalah seluruh mitra dengan jejaring layanan satu pintu.

2. Kemandirian Bangsa

Pengembangan UMKM diarahkan agar UMKM makin kokoh sebagai kekuatan utama soko guru perekonomian Indonesia. Di dalamnya juga terkandung tujuan agar UMKM mampu memasok sebagian besar kebutuhan dalam negeri dengan produk barang maupun layanan hasil karya anak bangsa sendiri. Ini menjadikan makin kokohnya UMKM sebagai pilar kemandirian bangsa.

3. Terukur

Program pengembangan UMKM harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat. Program harus dirancang dengan seksama. Tahapan-tahapan sasaran yang akan dicapai harus jelas. Akhir dalam setiap program harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Ukuran keberhasilan dari program tersebut dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

4. Komprehensif

Program pengembangan UMKM melibatkan beberapa institusi selaku pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu disesuaikan program – program yang akan dilaksanakan agar masing-masing institusi dapat mengikuti program tersebut dengan baik. Penyelesaian masalah dan pemberdayaan UMKM harus mendapatkan sekala prioritas yang tinggi dalam merencanakan program. Persoalan dalam pengembangan UMKM tidak dapat dipecahkan dengan satu disiplin ilmu saja. Oleh karena itu, sifat komprehensif harus diterapkan dalam pelaksanaan pengembangan UMKM.

2.5.2 Landasan Pengembangan UMKM

Dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2018 tentang UMKM menurut Budiarto,dkk (2016:92):

1. Akses pendanaan bagi UMKM dilakukan dalam rangka:
 - a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi akses kredit,
 - b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya,
 - c. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan,

- d. Membantu pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan jasa/produk keangan, baik dari perbankan (sistem konvensional maupun sistem syariah) atau dari lembaga nonbank.
2. Aspek sarana dan prasarana, dilakukan dalam rangka:
 - a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMKM
 - b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu.
3. Aspek informasi usaha, dilakukan dalam rangka:
 - a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi kredit,
 - b. Menyebarluaskan antara lain informasi pasar, sumber pembiayaan, komoditas penjaminan, design-teknologi dan mutu,
 - c. Jaminan transparansi dan akses yang sama.
4. Aspek kemitraan, dilakukan dalam rangka:
 - a. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah,
 - b. Mewujudkan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar,
 - c. Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar-UMKM,
 - d. Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar UMKM dengan usaha besar,
 - e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM,
 - f. Membentuk struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen,
 - g. Mencegah penguasaan pasar oleh perorangan dan kelompok tertentu yang dapat merugikan UMKM.
5. Aspek perizinan usaha, dilakukan dalam rangka:
 - a. Menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan dengan layanan satu pintu,
 - b. Upaya pembebasan biaya perizinan bagi UMKM.
6. Aspek kesempatan berusaha, dilakukan dalam rangka:
 - a. Menentukan peruntukan tempat usaha, yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan sebagainya,
 - b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk UMKM di subsektor perdagangan ritel,
 - c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta memiliki warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun,
 - d. Mencadangkan usaha terbuka bagi usaha besar dengan syarat kerjasama dengan UMKM, Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM,
 - e. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan UMKM,
 - f. Memprioritaskan pengadaan barang/jasa dan pemborongan kerja pemerintah,

- g. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- 7. Aspek promosi dagang, ditujukan dalam rangka:
 - a. Meningkatkan promosi produk UMKM di dalam maupun di luar negeri,
 - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM,
 - c. Memberikan insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi
 - d. Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual.
- 8. Aspek dukungan kelembagaan ditujukan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan peninjauan pada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Peneliti
1	Wardani Hesti Kusuma (2013)	Peranan Dinas Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang.	Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif, Dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi.	Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung dan pengambatnya. Saran yang

				diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan pendataan terhadap semua UKM yang ada di Malang.
2	Nur Dwi Sepriono (2017)	Peran Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda.	Jenis Penelitian ini Menggunakan Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat agar UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas

				<p>Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota Samarinda. Faktor pendukung kegiatan pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi dukungan fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta dukungan dari asosiasi UKM.</p>
3	Kristina Sedyastuti(2018)	“Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya	Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif, Dalam penelitian ini	Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan

		Saing Dalam Kancah Pasar Global	penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.	UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah hubungan dengan prospek bisnis yang kurang jelas dan perencanaan visi misi yang belum stabil. Pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudahan akses pendanaan dan pendampingan serta peningkatan
--	--	---------------------------------------	--	--

				<p>kapasitas teknologi informasi merupakan beberapa strategi peningkatan daya saing UMKM Indonesia, yang tak kalah pentingnya adalah jiwa kewirausahaan yang tak pantang menyerah. Oleh karena itu diperlukan sinergi semua pihak terutama antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan.</p>
--	--	--	--	--

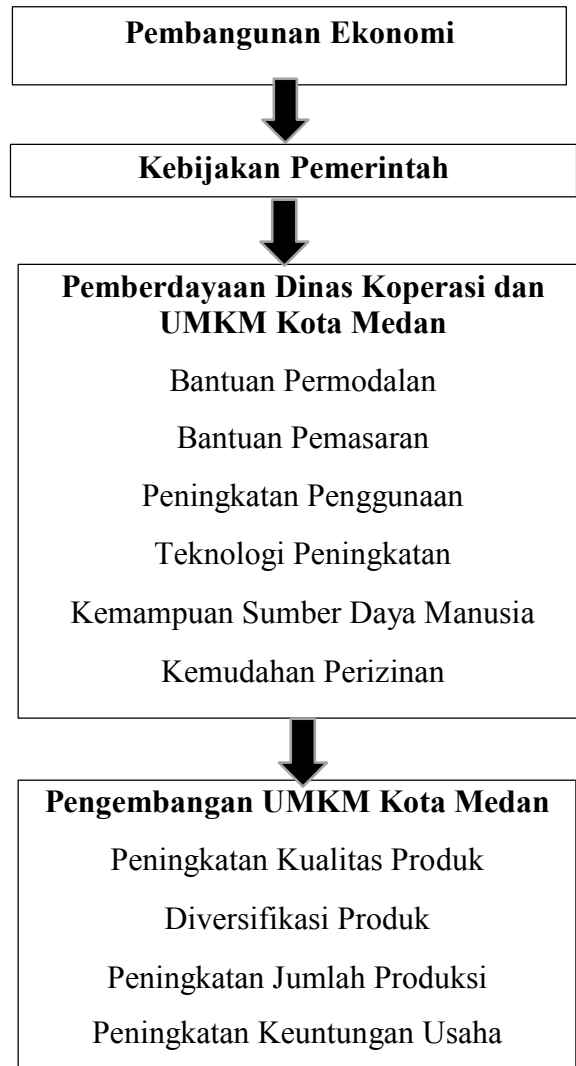
2.7 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dan UMKM telah menjadi perhatian beberapa peneliti. Juga merupakan perhatian bagi UMKM. Dengan adanya pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan akan tercipta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah di Kota Medan.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam pengembangan UMKM di Kota Medan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai

berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber diolah dari pemikiran peneliti

Dari kerangka pemikiran diatas penulis menjelaskan bahwa: Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Dalam pembangunan ekonomi memerlukan kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah

dalam pembangunan ekonomi adalah Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM. Dalam kebijakan pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan melakukan berbagai program yaitu seperti: pemberdayaan bantuan permodalan, bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan teknologi, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, dan kemudahan perizinan. Sebagai output dari pelaksanaan program diharapkan akan memberikan hasil peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk, peningkatan jumlah produk dan peningkatan keuntungan usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2018:9) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan UMKM Kota Medan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan di Jl. Gatot Subroto KM.77 Kampung Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20126. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2022-Mei 2023.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian & Penulisan Skripsi

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan																																			
		September 2022				Oktober 2022				November 2022				Desember 2022				Januari 2023				Februari 2023				Maret 2023				April 2023				Mei 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																																			
2	ACC Judul				■																																
3	Persetujuan Pembimbing								■																												
4	Bahan Literatur								■																												
5	Penyusunan Proposal								■	■	■	■	■																								
6	Bimbingan Proposal												■	■	■	■	■																				
7	Seminar Proposal																																				
8	Revisi Proposal																■																				
9	Pengumpulan Data (Penelitian)																				■	■	■	■	■												
10	Pengolahan dan Analisis Data																								■	■	■	■	■								
11	Bimbingan Skripsi																																				
12	Periksa Buku																																				
13	Ujian Meja Hijau																																				■

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti ditempat penelitian diantaranya :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yaitu Ibu Safrida Habsah, S.Sos.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Pemilik UMKM Batik Mardiyah yaitu ibu Nurul H. Nasution, Pemilik UMKM Aneka Parfum yaitu Bapak Joko Febryanto, dan Pemilik UMKM Irjie Kaligrafi yaitu ibu Pujiati. Alasan peneliti memilih Pemilik UMKM Batik Mardiyah, Pemilik UMKM Aneka Parfum dan Pemilik UMKM Irjie Kaligrafi menjadi informan utama karena UMKM ini merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang terlibat dalam pemberdayaan yang di berikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.
3. Informan Pendukung, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan pada suatu penelitian. Informasi pendukung dalam penelitian ini adalah Karyawan UMKM Batik Mardiyah yaitu ibu Nurhaidah, Karyawan UMKM Aneka Parfum yaitu Bapak Fandi dan Karyawan UMKM Irjie Kaligrafi yaitu Bapak Sukirno.

3.4 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data primer dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan . Teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh dengan cara :

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang mengadakan Tanya jawab langsung dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM dan informasi yang terdiri dari lima sampai delapan kelompok yang berhubungan mengenai bagaimana perkembangan UMKM dengan adanya peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2018: 412) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa

pertanyaan-pertanyaan tertulis Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Pemilik UMKM Batik Mardiyah, Pemilik UMKM Aneka Parfum dan Pemilik UMKM Irjie Kaligrafi, serta Karyawan UMKM Batik Mardiyah, Karyawan UMKM Aneka Parfum, dan Karyawan UMKM Irjie Kaligrafi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia atau data yang telah diolah oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh dengan cara :

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dan lainnya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018: 240).

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono (2018:428).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang di rumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Sugiyono (2018:428). Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif Hueberman dan Miles. Hueberman dan Miles (Sugiyono, 2018:430) membuat model analisis data yang disebut model interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal, yakni :

1. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.